



# Ideologi dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli

A.A Sri Agung Pradnya Pramita dan A. A. Rai Sita Laksmi

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia

Correspondence E-mail: [agungpradnyaparamita@gmail.com](mailto:agungpradnyaparamita@gmail.com)

## Abstract

*Ideology is a social order in individuals that is stable and bound to tradition and there is power that is fully naturalized and unquestioned. This research analyzes ideology in tourism development at Penglipuran Village, Bangli Regency. In general, this research aims was to examine the values of cultural studies related to ideology and to understand the ideology underlying and its implementation in the development of tourism in Penglipuran Village. This research uses descriptive qualitative analysis method by applying the theory of practice from Bourdieau. The results indicate that the development of tourism in Penglipuran Village is based on the ideology of community-based tourism and the ideology of Tri Hita Karana. The implementation of community-based ideology can be observed in tourism management systems that involve the community, from planning, implementation and evaluation. While the implementation of Tri Hita Karana can be observed from the management of tourism that pays attention to the harmonization of the relationship between humans and God, humans and humans and humans and the environment.*

**Keywords:** Ideology; penglipuran village; tourism development

## Abstrak

Ideologi merupakan tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan. Penelitian ini menganalisis tentang ideologi dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai cultural studies yang berkaitan dengan ideologi dan untuk memahami ideologi yang melatarbelakangi dan implementasinya dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran. Penelitian ini menggunakan Metode analisis deskriptif kualitatif dengan menerapkan teori praktik dari Bourdieau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran dilatari oleh ideologi pariwisata berbasis masyarakat dan ideologi Tri Hita Karana. Implementasi ideologi berbasis masyarakat dapat dicermati pada sistem pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan implementasi Tri Hita Karana dapat dicermati dari pengelolaan pariwisata yang memperhatikan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.

**Kata Kunci:** Ideologi; desa penglipuran; pengembangan pariwisata

**How to Cite:** Pradnyaparamita, A, A, S, A . (2019). Ideologi dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2): 83-90

## **1. Pendahuluan**

Kehidupan masyarakat Bali pada dasarnya dilandasi oleh suatu ideologi. Menurut Bourdieu (2010), ideologi yang juga disebut *doxa* adalah tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan (Bourdieu, 2010). Dalam praktiknya *doxa* tampil lewat pengetahuan yang diterima begitu saja sesuai habitus dan ranah individu tanpa dipikir terlebih dahulu.

Dalam pengembangan pariwisata, masyarakat Bali memiliki ideologi yang dijadikan pedoman dalam bertindak laku. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali bahwa Pariwisata Bali merupakan Pariwisata Budaya yang dijiwai oleh Ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.

Salah satu daerah yang dijadikan sebagai pengembangan pariwisata Bali adalah Desa Penglipuran. Desa Penglipuran merupakan salah satu Desa Bali Aga yang berada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Keunikan dari Desa Penglipuran dapat dilihat dari pola pemukiman berupa pola pemukiman yang khas dengan struktur rumah yang seragam, terdapat pula hutan bambu dan hutan kayu yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Selain itu kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Penglipuran yang masih tradisional menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Dalam hubungannya dengan peran serta masyarakat, pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran dilakukan dengan lebih mengedepankan peran serta desa adat setempat. Pengembangan pariwisata dengan melibatkan peran desa adat pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari konsep kebijakan pembangunan pariwisata berdimensi kerakyatan. Wacana mengenai pembangunan berwawasan kerakyatan merupakan reaksi keras terhadap kebijakan pembangunan konglomerasi yang selama ini lebih berpihak kepada pemilik modal. Pembangunan berwawasan kerakyatan lebih mengedepankan peningkatan ekonomi rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dengan paradigma yang dibalik ini menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahap pembangunan, sehingga pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya paling dipengaruhi oleh pembangunan, atau apa yang disebut dengan *community based resource management* (Korten, 1986).

Pada Penelitian sebelumnya, (Udayana, 2017) Menemukan penerapan ideologi tri hita karena sebagai langkah pengembangan pariwisata pada media promosi pariwisata budaya di Bali adalah ideologi kapitalisme dan ideologi dualisme kultural. Hal ini terjadi karena pembuatan media promosi pariwisata pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi objek yang dipromosikan. Penelitian lainnya oleh (Rahmi, 2016) menemukan Prioritas utama dalam upaya pembangunan sektor pariwisata selalu dihubungkan dengan objek dan daya tarik wisata. Upaya tersebut untuk menselaraskan faktor-faktor pendukung, yang antara lain sarana dan prasarana penunjang sebagai salah satu sektor unggulan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan saat ini ialah potensi budaya atau kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan beberapa referensi dan pendahuluan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik Ideologi dalam Pengembangan Pariwisata yang secara khusus mengkaji nilai-nilai *cultural studies* yang berkaitan dengan ideologi dan untuk memahami ideologi yang melatarbelakangi dan implementasinya dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran. Sebagai daerah pariwisata, Desa Penglipuran tidak terlepas dari kunjungan para wisatawan yang berpengaruh terhadap pengembangan desa. Akan tetapi, Desa Penglipuran tetap mampu menjaga dan

mempertahankan budaya yang dimiliki. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ideologi yang kuat yang dijadikan pedoman dalam pengembangan pariwisata.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Penglipuran. Jenis data yang dipergunakan adalah jenis data kualitatif dan juga didukung oleh data kuantitatif. Sementara itu, sumber data terdiri atas sumber data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, melalui proses wawancara dengan para informan dan sumber data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilakukan melalui pengamatan, pencatatan terhadap perilaku masyarakat Desa Penglipuran yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata. Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Selain pengamatan langsung dan wawancara dengan para informan, kajian ini juga menggunakan studi dokumen. Sebelum dilakukan analisis, semua data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diidentifikasi dan diklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Selanjutnya data diklasifikasikan, dianalisis dengan mengaplikasikan teori-teori yang telah ditetapkan. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk deskripsi dan narasi.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

Ideologi adalah ide-ide, gugus makna, dan praktik yang mendukung kekuasaan kelas sosial tertentu, meskipun diklaim sebagai dalil-dalil kebenaran yang berlaku universal (Gramsci, 2014). Ideologi dalam pengertian Gramsci tidak dapat dilepaskan dari kegiatan praktis sehari-hari, namun ideologi sekaligus menyediakan aturan cara-cara berperilaku praktis maupun moral bagi orang per-orang yang berakar dalam kondisi-kondisi hidup sehari-hari. Dalam konteks ini ideologi yang melatarbelakangi pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran, yaitu ideologi pariwisata berbasis masyarakat dan ideologi Tri Hita Karana.

### **Ideologi Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Pengembangan Desa Wisata Penglipuran dilandasi dengan ide atau gagasan pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini dapat dilihat secara nyata pada tugu di areal parkir yang bertuliskan Desa Wisata Penglipuran Berbasis Masyarakat, yang diresmikan pada tanggal 15 Desember 2012 oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ir. Firmansyah Rahim. Penetapan Desa Penglipuran sebagai Desa Wisata ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 116 tahun 1993 tentang penunjukkan Desa Adat Penglipuran sebagai petugas pungut retribusi wisata. Selanjutnya mengingat beban prajuru adat yang semakin kompleks, maka pada tanggal 1 Mei 2012 Desa Adat membentuk lembaga pengelola yang bernama Lembaga Pengelola Desa Wisata Penglipuran. Lembaga ini berada di bawah naungan desa adat dan bertanggung jawab penuh kepada desa adat.

Desa Adat Penglipuran mempunyai peranan atau tugas penting yang harus dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran. Hal ini dapat dicermati dari kedudukan desa adat dalam lembaga pengelola Desa Wisata Penglipuran. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam lembaga pengelola, desa adat memiliki kedudukan yang tinggi yakni sebagai dewan pembina. Dalam hal ini tugas desa adat sebagai dewan pembina adalah memberikan arahan kepada pengelola dan memberikan masukan serta solusi atas persoalan yang dihadapi oleh pengelola. Selain itu Desa Adat juga memiliki wewenang untuk memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan pengembangan pariwisata.

Keterlibatan Desa Adat Penglipuran dalam lembaga pengelola menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran sejalan dengan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Korten dalam (Moeljarto, 1993) yakni prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap diletakkan pada masyarakat itu sendiri. Dengan keterlibatan Desa Adat Penglipuran dalam lembaga pengelola, dengan sendirinya desa adat tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan-

kegiatan yang bersifat adat dan keagamaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola hal-hal yang bersifat modern seperti kegiatan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fokus utama dari kegiatan pariwisata berbasis masyarakat yakni meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran, desa adat juga mengembangkan potensi lokal yang dimiliki seperti kesenian berupa tari-tarian untuk kepentingan wisatawan, kerajinan bambu berupa miniatur paon, tempat pernak-pernik, kuliner khas Desa Penglipuran berupa loloh cemcem, kelepon ubi ungu. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adat Penglipuran mengembangkan variasi lokal yang dimiliki dan didalamnya menekankan pada proses belajar antar warga penglipuran mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi. Selain itu juga menjalin jaringan antar Desa Adat Penglipuran dengan pemerintah dan pengelola.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran, masyarakat memiliki sejumlah kemampuan atau pengetahuan untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Masyarakat Desa Penglipuran juga merupakan masyarakat yang paling tahu dan mewarisi pengetahuan secara turun temurun tentang sumber daya yang dimiliki baik fisik maupun budaya untuk dikembangkan dalam pembangunan kepariwisataan. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan, masyarakat Desa Penglipuran lebih memiliki tanggung jawab dibandingkan dengan mereka yang berasal dari luar, karena kegiatan yang dilakukan secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat Desa Penglipuran mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki. Sebagai contoh dapat dilihat pada pemeliharaan hutan yang ada di Desa Penglipuran. Dalam hal ini hanya masyarakat penglipuran yang mengetahui cara menjaga kelestarian hutan bambu dan hutan kayu yang dimiliki. Untuk menjaga kelestarian hutan bambu dan hutan kayu, dalam penebangan pohonnya dilakukan dengan mencari hari baik (dewasa ayu) dan menggunakan sesaji. Hal ini bertujuan agar pohon yang ditebang tidak dimakan rayap dan awet serta pohon lainnya dapat tumbuh dengan subur. Ini sesuai dengan pandangan Korten dalam (Pujaastawa, 2009) yang menyatakan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat (community management) sangat penting dilakukan. Hal ini terkait dengan pertama, adanya local variety (variasi lokal) yang tidak dapat diberikan perlakuan sama. Kedua, adanya local resources (sumber daya lokal) yang secara tradisional telah dikelola oleh masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Ketiga, local accountability (tanggung jawab lokal).

Masyarakat sebagai warga Desa Penglipuran juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran. Peran ini dapat dilihat pada (1) masyarakat mendukung seluruh program lembaga pengelola yang berada di bawah naungan desa adat; (2) masyarakat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Keterlibatan langsung dapat dilihat pada keterlibatan masyarakat sebagai pengurus dan staf pengelola desa wisata, masyarakat juga membuka art shop di masing-masing rumah dengan menggunakan sistem giliran bagi wisatawan asing yang ditetapkan oleh pengelola. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan pembagian kunjungan secara merata. Sedangkan keterlibatan tidak langsung ditunjukkan dengan kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat seperti menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh terhadap pariwisata.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Penglipuran mempunyai peran penting dalam pengembangan pariwisata seperti disebutkan Kanwil Deparsenibud Bali (Janamijaya, 2000), bahwa keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Daerah Bali tidak terlepas dari daya tarik kebudayaan, adat-istiadat, kesenian dalam berbagai jenis dan keanekaragamannya yang tentunya hal ini merupakan hasil karya dan ciptaan dari masyarakat Daerah Bali yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Disamping itu desa adat yang merupakan wadah dan milik masyarakat desa di Bali

sebagai pusat/lembaga dan ujung tombak dalam pembinaan kebudayaan Bali. Desa adat inilah yang sangat berperan di dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai luhur dari kebudayaan dan adat-istiadat daerah Bali serta mempunyai fungsi dan peran dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif terhadap kebudayaan tersebut.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Penglipuran merupakan praktik dari ideologi masyarakat Penglipuran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bourdieu, praktik merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk sejarah dan ranah yang juga merupakan produk sejarah (Harker, Mahar, & Wilkes, 2010). Dalam teori praktik, Bourdieu merumuskan bahwa praktik adalah gabungan habitus, modal, dan ranah (Harker et al., 2010). Habitus dalam masyarakat Desa Penglipuran dapat digali dari potensi yang mendukung pengembangan Desa Wisata Penglipuran. Bourdieu menyatakan bahwa habitus merupakan hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Dalam proses perolehan ketrampilan tersebut, struktur-struktur yang dibentuk berubah menjadi struktur-struktur yang membentuk. Jadi habitus menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran dan representasi (Haryatmoko, 2016). Dalam hal ini masyarakat Desa Penglipuran memiliki potensi berupa pola tata ruang desa dan struktur rumahnya yang seragam, lingkungan alamnya seperti hutan bambu dan hutan kayu, serta tradisi dan budaya masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Hal ini mempengaruhi habitus masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Selain itu keberadaan hutan bambu di Desa Penglipuran menyebabkan mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai pengrajin bambu. Mata pencaharian tersebut menjadikan masyarakat terampil dalam mengolah bambu sehingga dapat dijadikan berbagai souvenir khas Desa Penglipuran. Masyarakat memiliki semangat dan nilai-nilai yang dipegang dan digunakan untuk bekerja. Hal tersebut menjadi potensi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran.

Modal merupakan sebuah konsentrasi kekuatan, suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah (Harker et al., 2010). Bagi Bourdieu, modal merupakan energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil dalam ranah perjuangan di mana modal memproduksi dan diproduksi. Menurut Bourdieu, jenis modal yang menjadi pertarungan dalam arena adalah modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolis. Modal ekonomi berupa alat-alat produksi, seperti mesin, tanah, tenaga kerja termasuk materi seperti pendapatan dan benda-benda, serta uang. Modal sosial termanifestasi melalui hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial. Modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual, baik yang diproduksi secara formal maupun warisan keluarga, seperti pengetahuan, kode-kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, pembawaan, tata krama, dan cara bergaul yang berperan di dalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial. Modal simbolis adalah kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi sebagai akibat khusus suatu mobilisasi, seperti rumah di daerah perumahan yang mahal dan kantor di pusat perdagangan.

Masyarakat Desa Penglipuran yang mayoritas bekerja sebagai pengrajin bambu memiliki modal ekonomi berupa uang yang digunakan sebagai modal usaha mereka, tanah dan rumah yang mereka miliki, serta kendaraan yang mereka gunakan. Mereka meningkatkan modal ekonomi mereka untuk memperluas usahanya, di mana hal tersebut akan mempengaruhi modal simboliknya. Perluasan modal ekonomi juga tidak terlepas dengan kontribusi modal sosial dan modal budaya yang mereka miliki. Karena sejatinya modal-modal tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Modal sosial yang dimiliki masyarakat Desa Penglipuran dalam pengembangan pariwisata adalah hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang saling menguntungkan. Modal sosial dapat menciptakan suasana yang harmonis untuk mencapai tujuan masyarakat dalam

pengembangan pariwisata. Modal sosial dapat dicermati dari beberapa unsur yang saling berkaitan, antara lain partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, hubungan timbal balik, kepercayaan, nilai, norma, dan tindakan proaktif dari masyarakat.

Modal budaya masyarakat Desa Penglipuran dapat dilihat dari pendidikan masyarakat baik secara formal maupun informal. Pendidikan formal berupa kesadaran masyarakat untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan non formal berupa pembinaan, penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi terkait dengan pengembangan pariwisata. Modal budaya masyarakat Desa Penglipuran juga diperoleh secara turun temurun. Modal tersebut yang diwariskan kepada masyarakat berupa pengetahuan lokal mengenai pelestarian lingkungan yang dapat menunjang pengembangan pariwisata.

Modal simbolik masyarakat Desa Penglipuran dalam pengembangan pariwisata dapat dilihat dari kekuasaan desa adat. Dalam hal ini desa adat memiliki status tertinggi sebagai dewan pembina di dalam struktur badan pengelola desa wisata. Modal simbolik yang dimiliki desa adat ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan sugesti atau saran dan intruksi kepada masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Desa Wisata Penglipuran. Pemanfaatan modal simbolik ini hendaknya dilakukan secara bijaksana agar berjalan optimal.

Ranah (field) merupakan tempat untuk persaingan dan perjuangan. Masyarakat pada umumnya dalam kehidupan bermasyarakat harus menguasai dan memahami kondisi-kondisi yang terdapat di lingkungan masyarakatnya. Bourdieu menyatakan bahwa di dalam suatu ranah, agen-agen menempati posisi yang tersedia untuk terlibat dalam suatu kompetisi memperebutkan kontrol kepentingan atau sumber daya yang khas dalam ranah tersebut (Bourdieu, 2010).

Desa Penglipuran yang statusnya berubah menjadi desa wisata mengharuskan masyarakatnya memiliki kemampuan (skill) atau keterampilan agar mampu bertahan dalam kondisi desa wisata. Ranah yang dimaksud di sini adalah tempat di mana masyarakat Penglipuran itu tinggal, yaitu Desa Penglipuran yang merupakan tempat anggota masyarakatnya berjuang dan bersaing untuk memperoleh penghasilan dari desa wisata. Selain penghasilan, masyarakat Desa Penglipuran juga bersaing dalam hal keahlian. Desa Wisata Penglipuran dapat dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan berkecakupan, melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas masyarakat sekaligus untuk mengembangkan Desa Wisata Penglipuran. Ranah Desa Wisata Penglipuran ini merupakan tempat hubungan relasional. Sejalan dengan pandangan Bourdieu dan (Haryatmoko, 2016) yang menyatakan bahwa arena perjuangan kekuasaan merupakan lingkup hubungan-hubungan kekuatan antara berbagai jenis modal atau lebih tepatnya antara para pelaku yang memiliki jenis-jenis modal tertentu sehingga mampu mendominasi medan perjuangan yang terkait. Masyarakat bisa bekerja sama satu dengan lainnya untuk berusaha bersama meningkatkan taraf hidup mereka dalam suatu desa wisata. Hubungan relasional juga dapat dilihat dari hubungan pemerintah, baik kabupaten, kecamatan, maupun desa kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Desa Wisata Penglipuran ini bukan merupakan tempat yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang memiliki satu tujuan yang sama dan saling menguntungkan untuk pihak-pihak terkait. Dalam ranah ini mereka harus berusaha dengan memanfaatkan habitus positif mereka dan modal-modal yang dimiliki agar dapat menguasai dan memanfaatkan ranah tersebut dengan baik.

### **Ideologi Tri Hita Karana**

Pengembangan Desa Wisata Penglipuran juga dilandasi oleh ideologi Tri Hita Karana. Ideologi ini merupakan tiga unsur penyebab kebahagiaan yaitu, harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan (parhayangan), manusia dengan manusia (pawongan) dan manusia dengan lingkungan (palemahan). Implementasi hubungan ini dapat dicermati dari sikap dan perilaku masyarakat.

Pertama, dalam hubungannya dengan Tuhan masyarakat Desa Penglipuran masih mempertahankan tempat-tempat suci (pura) dan ritual tradisional sebagai warisan nenek moyang. Pura-pura yang ada di Desa Penglipuran antara lain Pura Penataran/ Bale Agung sebagai tempat pemujaan Dewa Brahma, Pura Puseh sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu, dan Pura Dalem (Pelapuan) sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Selain ketiga pura, di Desa Penglipuran tersebut juga terdapat sejumlah pura lainnya seperti, Pura Empu Aji sebagai tempat pesraman, Pura Empu Naluh untuk memuliakan mata air, Pura Dukuh sebagai tempat berstananya arwah pendeta orang Bali Aga, Pura Rambut Sri Sedana sebagai tempat untuk memuja dewa kemakmuran dan kesejahteraan, pura Ratu sakti Mas Ayu Manik Melasem, pura Ratu Sakti Gede Tungku,

Pura Dalem Pingit sebagai tempat prasasti, Pura Rajapati dan Pura Balai Banjar sebagai pemujaan Bhagawan Penyarikan. Pura sebagai tempat suci yang sekaligus sebagai daya tarik wisata selalu dijaga kesucian dan kebersihannya oleh masyarakat Desa Penglipuran. Bentuk kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh masyarakat adalah kerja bakti di sekitar lingkungan pura dalam dua kali sebulan. Selain itu, kerja bakti juga dilakukan secara lebih insentif menjelang pelaksanaan ritual pujawali dan hari-hari keagamaan.

Untuk menjaga kesucian dan kelestarian pura, pihak desa adat menetapkan sejumlah aturan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke pura. Aturan-aturan yang dimaksud antara lain, mewajibkan wisatawan untuk mengenakan kain dan selendang yang telah disediakan oleh pihak pengelola dan melarang wisatawan memasuki areal pura pada saat menstruasi. Selain itu wisatawan juga dilarang mengunjungi tempat-tempat yang dianggap sakral melewati waktu yang ditentukan. Dalam pemeliharaan bangunan suci, pihak pengelola juga memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan pura-pura di kawasan Desa Penglipuran sehingga bangunan suci bisa terawat dengan baik.

Kedua, dalam upaya mencapai harmonisasi hubungan manusia dengan manusia dapat dicermati dari pola hunian masyarakat Desa Penglipuran. Pada pola hunian tersebut terdapat jalan kecil yang menghubungkan satu rumah dengan rumah yang lain (embakan kapisaga). Hal ini bertujuan agar masing-masing penghuni rumah dapat saling tolong menolong, saling memberi dan saling menjaga satu sama lain.

Ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan (palemahan) di Desa Penglipuran dapat dilihat pada kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, pengelola desa wisata dan pemerintah. Masyarakat secara sadar melakukan penghijauan di sekitar pekarangan rumah serta membersihkan pekarangan dan telajakan setiap hari pada pagi dan sore hari. Dalam upaya mewujudkan daya tarik wisata yang bersih, sejuk dan indah, pihak pengelola memiliki seksi kebersihan dan pertamanan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan Desa Penglipuran. Kegiatan kebersihan dilakukan setiap hari di tempat-tempat tertentu seperti bale banjar, lingkungan pertamanan desa, dan di sekitar hutan bambu. Upaya sadar lingkungan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan membersihkan lingkungan diluar areal inti desa, seperti di sepanjang jalan utama sampai Tugu Pahlawan. Selain itu untuk menunjang kebersihan lingkungan, di Desa Penglipuran juga disediakan tempat sampah yang terdiri dari tempat sampah organik dan nonorganik yang diletakkan di beberapa area seperti di depan bale banjar, areal pertamanan, di depan Pura Penataran dan di depan rumah-rumah penduduk. Selain itu masyarakat juga menjaga kelestarian hutan bambu dan hutan kayu yang berada di sekitar desa. Upaya pelestarian dilakukan melalui aturan-aturan yang melarang masyarakat untuk menebang pohon bambu. Bagi masyarakat Desa Penglipuran yang ingin menebang pohon harus menggunakan hari baik atau dewasa ayu. Bilamana penebangan bambu tidak dilakukan dengan menggunakan hari baik, maka diyakini bambu akan menjadi rusak, mengering, lalu mati.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi yang melatari pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran adalah ideologi pariwisata berbasis masyarakat dan ideologi Tri Hita Karana. Implementasi ideologi berbasis masyarakat dapat dicermati pada sistem pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan implementasi Tri Hita Karana dapat dicermati dari pengelolaan pariwisata yang memperhatikan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.

#### **Daftar Pustaka**

- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Gramsci, A. (2014). *Prison Notebook (Catatan-Catatan Dari Penjara)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2010). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bordieu*. Yogyakarta: Jalasutra. Retrieved from <https://www.goodreads.com/book/show/8107809-habitus-x-modal-ranah-praktik>
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian*. Yogyakarta: Kanisius.

- Janamijaya, I. G. (2000). Eksistensi Desa Adat, Budaya dan Pariwisata. Denpasar: Kerjasama Pusat Pengkajian Pedesaan dan Kawasan dengan Nusantara Aneka Jaya Abadi.
- Korten, D. C. (1986). *Community Management : Asian Experience and Perspectives*. West Hartford: Kumarian Press. Retrieved from <https://trove.nla.gov.au/work/12168679?q&versionId=14354515>
- Moeljarto, T. (1993). Politik Pembangunan Sebuah Analisis konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta. Retrieved from PT Tirta Wacana
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya
- Pujaastawa, I. B. G. (2009). Buku Ajar Antropologi Pariwisata. Denpasar. Retrieved from Program Studi Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana
- [Rahmi, S. A. \(2016\). Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal. Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6\(1\), 76–84.](#)
- Udayana, A. A. G. B. (2017). Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali. *Mudra: Jurnal Seni Budaya*, 32(1), 110–122. Retrieved from <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>